

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA  
(Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariahdi Indonesia)**

**Anhara**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI*

*Email:anhara@yahoo.co.id*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to examine whether the institutional ownership, managerial ownership, the audit committee, member of the audit committee membership, the number of members of the audit committee meeting, the supervisory board and the size of the company's sharia effect on earnings management. This type of research used in this study are causal comparative research. The population in this study are all Islamic banks and Islamic business units in Indonesia. Data used is secondary data. The data collection method used is book study method and the method of documentation. The analysis used is multiple regression analysis. The results showed that partially institutional ownership, managerial ownership, audit committee, and the number of meetings of the audit committee members and significant influence to earnings management. While the expertise of audit committee members, the Sharia Supervisory Board, and the company size has no effect and no significant effect on earnings management.*

**Keywords:** *Good corporate governance, earnings management, Islamic banking*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, anggota dari keanggotaan komite audit, jumlah anggota rapat komite audit, dewan pengawas dan ukuran efek syariah perusahaan pada laba pengelolaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan sebagian institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan jumlah pertemuan anggota komite audit dan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sementara keahlian dari anggota komite audit, Syariah Dewan Pengawas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

**Kata kunci:** *Good corporate governance, manajemen laba, perbankan syariah*

**PENDAHULUAN**

*Income statement* perusahaan merupakan komponen penting yang seringkali dijadikan alat untuk menginformasikan kinerja perusahaan khususnya laba. Laba sebagai salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam laporan keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Informasi laba

merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, dan menaksir risiko investasi. Disamping itu informasi laba juga dapat digunakan oleh pemilik maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam membantu memprediksi *earning power* perusahaan di masa yang akan datang.

Hasan, (2013) mengemukakan satu dari berbagai tehnik yang dilakukan dalam manajemen laba yaitu perataan laba (*income smoothing*). Tehnik perataan laba yaitu perilaku meratakan laba dari waktu ke waktu sehingga pelaporan nilainya tidak berfluktuasi. Kepercayaan investor akan semakin tumbuh sehingga pihak manajemen memiliki peluang untuk mengendalikan perusahaan sebaik-baiknya dalam rangka menarik minat investor baik asing maupun lokal. Investor merasa aman untuk berinvestasi, maka perlindungan terhadap investor tercermin kuat melalui Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/062000 yang kemudian diubah dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339/BEJ/072001), butir F.1.f menyebutkan bahwa perusahaan tercatat dilarang untuk melakukan tindakan rekayasa keterbukaan informasi.

Teori keagenan (*Agency theory*) menyatakan, manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan yang sering terdorong untuk melakukan tindakan yang dapat memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri (*dysfunctional behaviour*) dan atau perusahaannya. Adanya kecenderungan untuk lebih memperhatikan kondisi laba perusahaan ini, telah disadari oleh pihak manajemen, khususnya yang menyangkut kinerjanya yang diukur atas dasar informasi tersebut, telah mendorong terjadinya berbagai penyimpangan perilaku (*dysfunctional behavior*). Satu dari berbagai bentuk dari manajemen laba adalah perataan laba (*income smoothing*) yang pada dasarnya merupakan tindakan yang dinilai bertentangan dengan tujuan perusahaan. Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui berbagai cara akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap tindak lanjut para pengguna informasi yang bersangkutan.

Manajemen laba menurut Scott (2011) adalah "*The choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*". Hal ini berarti manajemen laba merupakan keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan. Menurut Scott (2011) beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan *earning management*, antara lain adalah (1) Motivasi bonus, yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonusnya; (2) Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*), berkaitan dengan persyaratan per-janjian hutang yang harus dipenuhi, laba yang tinggi diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran syarat perjanjian hutang; (3) *Meet Investors Earnings Expectations and Maintain Reputation*, perusahaan yang melaporkan laba lebih besar daripada ekspektasi investor harga sahamnya akan mengalami peningkatan yang signifikan karena investor memprediksi perusahaan akan mempunyai masa depan yang lebih baik; (4) IPO (*Initial Public Offering*), manajer perusahaan yang akan *go public* termotivasi untuk melakukan manajemen laba sehingga laba yang dilaporkan menjadi tinggi dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

Perusahaan dalam melakukan kerjasama dengan cara menggunakan hubungan keagenan. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *earning management*. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua

kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. *Agency Theory* pada dasarnya mengatur hubungan antara satu kelompok pemberi kerja (*principle*) dengan penerima tugas (*agent*). *Agency Theory* sangat relevan bagi perbankan bank syariah. Hal ini dikarenakan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparan bagi penggunaan dana nasabah dan pemilik perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari sisi kewajiban atau liabilitas perbankan syariah dalam mempertanggungjawabkan dana investor yang dilakukan dalam kontrak atau akad investasi sesuai dalam perbankan Islam. Apabila dilihat dari sisi harta atau aset perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan secara bagi hasil harus dapat dimonitoring lebih efektif untuk memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa proyek yang didanai mendapatkan pengawasan dan pelaporan yang memadai sehingga terhindar dari rekayasa keuntungan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank bagi hasil sering disebut Bank Syariah (Bank Islam). Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang menggunakan system dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam.

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Bank syariah didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka UU No. 7 Th. 1992 disempurnakan dengan UU No. 10 Th. 1998 yang telah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi keuangan yang berbeda dengan standar akuntansi keuangan bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Salah satu komponen dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Dalam akuntansi syariah, perhitungan laba rugi (*statement of income*) adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Suatu laporan keuangan memiliki landasan konseptual yang mendasarinya. Perhitungan laba rugi merupakan laporan yang digunakan untuk menilai dan mengukur laba.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak atas dasar prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak seharusnya melakukan aktivitas rekayasa dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pelaporan keuangan, yang merupakan media informasi bagi para penggunanya. Rekayasa keuangan seringkali dilakukan manajemen perusahaan untuk menutupi kelemahan yang ada pada perusahaan, terlebih dalam laporan keuangan agar terlihat sempurna atau sering dikenal dengan istilah *window dressing*. Manajemen laba sering digunakan para agen dalam melakukan *window dressing*. Banyak perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan melakukan perataan laba untuk menutupi kekurangan laporan keuangan pada periode tertentu agar terlihat lebih menarik bagi pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan pun terindikasi melakukan praktik manajemen laba, tidak hanya perusahaan manufaktur.

Perusahaan atau bank dalam melakukan suatu kegiatan ingin memperoleh laba yang tinggi. Menurut Rahayu (2009, dalam Faradila dan Cahyati, 2013), adanya manajemen laba pada suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan pendekatan metode *akrual diskresioner* yang merupakan penggunaan kebijakan *discretion* (pilihan, atau pertimbangan manager alih-alih sekedar mengikuti atau diturunkan dari kondisi ekonomik perusahaan) manajemen yang berlebihan dan bila pada saat yang sama manajemen juga

memiliki insentif atau motif untuk memanipulasi laba maka perubahan akrual yang terjadi dianggap sebagai bentuk manipulasi laba yang dilakukan manajemen.

Penelitian dengan menggunakan hipotesis manajemen laba pada perbankan syariah belum begitu banyak meskipun bank syariah memiliki karakteristik lingkungan yang unik (Boulila, *et al.*, 2010). *Pertama*, bank syariah diatur dengan prinsip-prinsip Islam (syariat) yang menggunakan mekanisme pembagian risiko di antara para investor. *Kedua*, regulasi yang berhubungan dengan akuntansi syariah tidak membatasi penggunaan *dynamic provisioning*, sehingga bank Islam memiliki kecenderungan untuk membentuk penyisihan kerugian untuk menyerap kerugian di masa depan. Namun demikian, bank syariah sudah sewajarnya tidak terlibat dalam praktik manajemen laba apapun itu bentuknya, karena pada dasarnya bank syariah memiliki sifat yang amanah (dapat di percaya) menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga dapat memberikan informasi yang valid bagi pengguna laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang mengandung unsur manajemen laba dapat menyesatkan pembacanya, dimana secara syariah hal ini juga tidak diperbolehkan (dilarang).

Praktik manajemen laba terjadi di berbagai perusahaan, baik sektor perdagangan, manufaktur maupun sektor industri jasa. Zahara dan Siregar (2009), Padmanty (2010), dan Syahfandi & Mutmainah (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya indikasi pengelolaan laba pada sektor jasa perbankan syariah. Ini menunjukkan bahwa praktik manajemen laba merupakan suatu fenomena yang umum terjadi, tidak hanya pada perusahaan sektor perdagangan, maupun sektor manufaktur tetapi pada sektor industri jasa yaitu perbankan syariah.

Kasus kecurangan tentang pelaporan keuangan telah terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti kasus yang terjadi pada Xerox, Eron, Worldcom, Adelphia, Microstrategy (Stice *et al.*: 2007). Pada tahun 2001 di Indonesia telah terjadi skandal keuangan perusahaan yang melibatkan persoalan laporan keuangan yang diterbitkan, seperti kasus yang terjadi pada PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma.

Berdasarkan beberapa kasus skandal pelaporan keuangan telah menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan untuk meminimalkan manajemen laba. Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme monitoring yang mampu menyeimbangkan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham maupun pihak lainnya.

*Agency theory* memberikan gambaran bahwa masalah manajemen laba dapat diminimalisir dengan pengawasan melalui *good corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu konsep untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) semakin banyak dikemukakan oleh para praktisi bisnis sebagai suatu alat untuk mencegah terjadinya kasus keuangan. Satu dari berbagai komponen yang berperan penting dalam proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah komite audit. Peranan komite audit dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan perusahaan telah menjadi sorotan sejak terjadinya skandal akuntansi yang menjadi perhatian publik.

Komite audit merupakan komponen GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (4) tindak lanjut temuan hasil

audit dilaksanakan oleh manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dengan adanya komite audit yang efektif diharapkan tindak manajemen laba dapat dibatasi.

Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Penunjukan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajer bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya. Perbedaan informasi ini disebut sebagai *asymmetric information*.

Pihak pemilik dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada manajer dan harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan atau *monitoring cost* untuk mencegah *hazard* dari manajer. Biaya-biaya tersebut disebut sebagai biaya keagenan atau *agency cost*. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya adalah *Pertama*, dengan meningkatkan kepemilikan dari dalam (*insider ownership*) atau kepemilikan manajerial. Menurut Jensen dan Meckling (1976) penambahan kepemilikan manajerial memiliki keuntungan untuk mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham. *Kedua*, dengan menggunakan kebijakan hutang. Pemegang saham akan melakukan *monitoring* terhadap manajemen namun bila biaya *monitoring* tersebut terlalu tinggi maka mereka akan menggunakan pihak ketiga (*debtholders* dan atau *bondholders*) untuk membantu mereka melakukan *monitoring*. *Debtholders* yang sudah menanamkan dananya di perusahaan dengan sendirinya akan berusaha melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. *Ketiga*, melalui peningkatan *Dividend Payout Ratio (DPR)* atau rasio dividen terhadap laba bersih. Crutchley dan Hansen (1989) menyatakan bahwa pembayaran dividen akan menjadi alat *monitoring* sekaligus *bonding* bagi manajemen. *Keempat*, dengan cara mengaktifkan monitoring melalui investor-investor institusional. Adanya kepemilikan oleh *institutional investor* seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen.

Penelitian Khafid (2012) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Kusumawati dkk (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Dari uraian latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dilakukan pembahasan pada penelitian ini, yaitu: Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, keahlian anggota komite audit, jumlah pertemuan anggota komite audit, dewan pengawas syariah, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk mengkaji apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, keahlian anggota komite audit, jumlah pertemuan anggota komite audit, dewan pengawas syariah dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perusahaan merupakan pusat perjanjian kontrak antara berbagai pihak yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda, yaitu pemegang saham, manajemen yang diwakili

oleh manajer, supplier dan pihak-pihak lainnya termasuk calon investor dan karyawan. Teori yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak tersebut (pihak *principal* dan *agent*) disebut teori keagenan (*agency theory*). Masalah yang mendasari dari teori keagenan adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dalam perusahaan tersebut. Manajer yang disebut *agent* dan pemilik yang disebut *principal* merupakan dua pihak yang masing-masing memiliki tujuan berbeda dalam mengendalikan perusahaan terutama menyangkut bagaimana memaksimalkan kepuasan dan kepentingan dari hasil yang dicapai melalui aktivitas usaha.

Hasan, (2013) menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan yang terdapat dalam perusahaan antar pemilik dan manajer merupakan dua kepentingan yang saling berbeda. Pemilik perusahaan lebih tertarik untuk memaksimalkan *return on investment* (ROI) dan menginginkan *security prices* (kestabilan harga), sementara manajer cenderung memiliki motivasi yang lebih luas baik dari sisi ekonomi maupun psikologi untuk memaksimalkan total kepuasannya. Sementara menurut Hasan, (2013) menjelaskan dua kepentingan antara pemilik dan manajer lebih mengarah kepada resiko bisnis usaha. Pemilik yang pada dasarnya lebih memilih untuk menghindari resiko sedangkan manajemen yang diwakili oleh manajer menganggap tidak terdapat perbedaan resiko yang ada dalam perusahaan. Dilema yang muncul antara kedua pihak tersebut menciptakan sebuah hubungan yang akan mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*), dimana biaya ini merupakan penurunan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal dan kepentingan agen.

Akibat dari konflik kepentingan yang pada dasarnya masih terus terjadi antara prinsipal dan agen, maka dalam hal ini manajer berusaha untuk melakukan upaya-upaya tertentu dalam menjaga keseimbangan kondisi yang diharapkan. Upaya yang umum dilakukan manajer adalah melalui *earnings management* (manajemen laba) yang satu diantaranya adalah *income smoothing* (perataan laba). Tindakan ini ditempuh melalui pemilihan prosedur akuntansi yang dinilai dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan menyangkut tujuan yang hendak dicapai, misalnya mempermudah perusahaan dalam memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan serta menarik minat investor.

### **Teori Asimetri Informasi (*Information Asymmetry Theory*)**

Satu dari berbagai kondisi yang menyebabkan perbedaan antara agen dan pemilik, disamping masalah keagenan adalah ketidakmerataan informasi (*information asymmetry*) yang berakibat pada besarnya peluang manajer untuk melakukan hal yang menguntungkan bagi kepentingannya. Disamping itu kondisi perusahaan yang dapat dilihat perkembangannya dapat pula mempengaruhi terjadinya ketidakmerataan informasi ini. Hasan (2013) juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa kondisi perusahaan yang dapat menimbulkan kondisi *information asymmetry* yaitu perusahaan yang sangat besar, memiliki penyebaran secara geografis, memiliki produk yang beragam serta membutuhkan teknologi. Hal ini jelas akan memberikan pengaruh kepada investor dimana akan sulit secara objektif dalam membedakan antara perusahaan yang berkualitas tinggi dengan perusahaan yang berkualitas rendah.

Menurut Hasan (2013) beberapa perusahaan yang menjalankan transaksi bisnisnya kemungkinan akan memiliki suatu keuntungan dari sisi informasi dibandingkan yang lain. Terdapat dua jenis *information asymmetry* yang mengakibatkan keuntungan tersebut yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

*Adverse selection* merupakan jenis *information asymmetry* yang menimbulkan permasalahan dimana penyampaian informasi dari perusahaan kepada investor luar yang kurang relevan, disebabkan manajer lebih mengetahui kondisi perusahaan saat sekarang dan prospeknya dimasa mendatang dibandingkan pihak investor, sedangkan dalam *moral hazard*, permasalahan yang timbul karena lemahnya pengawasan terhadap aktivitas

manajer dalam menjalankan perusahaan sehingga mendorong para manajer tersebut untuk memberikan informasi yang bias dan tidak relevan. Akibatnya akan sulit sekali bagi pemegang saham dan kreditur untuk mengamati secara langsung tingkat keseriusan manajer untuk melakukan suatu tindakan bagi kepentingannya.

### **Teori Stakeholder**

Ghozali dan Chariri (2011) menyatakan bahwa dalam *stakeholder theory* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendirnamun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis perusahaan, dan pihak lainnya). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh para *stakeholder*. Ghozali dan Chariri (2011) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.

Teori *stakeholder* secara eksplisit mempertimbangkan akan dampak kebijakan pengungkapan perusahaan ketika ada perbedaan kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan. Pengungkapan informasi oleh perusahaan dijadikan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok (*stakeholders*). Oleh karena itu manajemen mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dalam rangka mengelola *stakeholder* agar perusahaan mendapatkan dukungan dari mereka. Dukungan tersebut dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Mainardes *et al.* (2011) menjelaskan *Stakeholder theory*, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbedatentang *Stakeholder theory*, prinsipnya sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Mainardes *et al.*, 2011). Ullman (1985) berargumen bahwa kekuatan dari *stakeholder* tergantung dari bentuk strategi yang digunakan oleh perusahaan. Menurut Ullman (1985: 552), bentuk strategi perusahaan adalah " *the mode of response of an organization's key decisionmakers towards social demands*".

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh peran *stakeholder* dan mempengaruhi *stakeholder* pula.

### **Earning Management (Manajemen Laba)**

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias dalam laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Achmad, *et al.*, 2007). Manajemen laba merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara pemilihan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan (Scoot, 2011).

Menurut Utomo dan Bachrudin (2005), manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan *judgement* dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang menyesatkan terhadap pemegang saham atas dasar kinerja ekonomi organisasi atau untuk mempengaruhi hasil sesuai dengan kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat dilakukan permainan angka

melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2011).

## **Model Pendeteksian Manajemen Laba**

### ***Modified Jones Model***

Dasar akrual merupakan dasar yang dipilih untuk penyusunan laporan akuntansi keuangan yang mana dasar akrual dipandang lebih rasional dibandingkan dasar kas. Selain itu dasar akrual juga lebih mampu menunjukkan dan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dimana hak dan kewajiban perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan tersebut. Namun dasar akrual juga memberi kelonggaran pada manajemen dalam hal pemilihan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang bersangkutan. Peluang ini sering digunakan oleh manajer ketika mereka menghendaki insentif tertentu bagi dirinya (Handayani, 2014).

Menurut Handayani (2014), pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menggunakan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat mencapai tujuan pelaporan keuangan. Tujuan utama dari akuntansi akrual adalah untuk melindungi investor dalam menaksir kinerja ekonomi perusahaan selama satu periode, melalui penggunaan prinsip akuntansi dasar seperti pengakuan pendapatan dan penandingan. Dengan dasar akrual ini, transaksi dan peristiwa akuntansi diakui bukan pada saat kas diterima namun pada saat terjadinya untuk kemudian diakui pada periode bersangkutan.

Manajemen laba diproksikan melalui *discretionary accrual* (Dechow, et al., 1995) dan *discretionary revenue* (Stubben, 2010). Model *accrual* merupakan model yang paling umum digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dan telah banyak penelitian mengenai manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual*. Model *accrual* dari Dechow, et al., (1995), atau lebih dikenal dengan *modified Jones model*, ini mengkondisikan perubahan dalam pendapatan kas dari pada total pendapatan (Stubben, 2010). *Modified Jones model* ini dipilih karena banyak penelitian mengenai manajemen laba di Indonesia yang menggunakan model ini seperti Halim, et al., (2005), Siregar dkk (2005), dan Fanani (2006).

Terdapat dua konsep akrual yaitu : *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan accrual yang ditentukan manajemen karena manajemen dapat memilih kebijakan dalam hal metode dan estimasi akuntansi. Disinilah kelemahan dari dasar accrual yang menimbulkan peluang manajer untuk mengimplementasikan strategi manajemen laba. *Discretionary accruals* merupakan strategi yang lebih sulit dideteksi sehingga pendeteksiannya memerlukan penginvestigasian data dan analisis yang lebih rinci (Achmad, et al., 2007).

*Non-discretionary accruals* merupakan accrual yang ditentukan atas kondisi ekonomi, merupakan pengakuan laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. *Non-discretionary accrual* merupakan accrual yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar), oleh karena itu bentuk akrual yang di analisis dalam penelitian ini adalah *discretionary accruals* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

### ***Conditional Revenue Model***

*Conditional revenue model* diperkenalkan oleh Stubben (2010) atas dasar ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan saat ini. Pertama, keterbatasan model akrual adalah bahwa estimasi *cross-sectional* secara tidak langsung

mengasumsikan bahwa perusahaan dalam industri yang sama menghasilkan proses akrual yang sama. Kedua, model akrual juga tidak menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan dimana model akrual tidak membedakan peningkatan diskresionari pada laba melalui pendapatan atau komponen beban. (Stubben, 2010)

*Conditional revenue model* ini, menitikberatkan pada pendapatan yang memiliki hubungan secara langsung dengan piutang. Dechow and Schrand (2004) dalam Stubben (2010), menemukan bahwa lebih dari 70 persen kasus SEC *Accounting and Auditing Enforcement Release* melibatkan salah saji pendapatan. Model *conditional revenue* dari Stubben (2010) ini menggunakan piutang akrual dari pada akrual agregat sebagai fungsi dari perubahan pendapatan. Sebagai komponen akrual utama, piutang memiliki hubungan empiris yang kuat dan hubungan konseptual langsung pada pendapatan. Dalam penelitiannya terdahulu, Stubben (2006) menemukan bukti bahwa hubungan antara perubahan piutang dan perubahan pendapatan yang lebih besar daripada hubungan antara *current accrual* dan perubahan piutang.

Hal ini juga berhubungan dengan kebijakan manajemen yang dapat menentukan atau mengambil keputusan dalam pemberian kredit. Ketika pendapatan mengalami kenaikan maka dapat disertai dengan kenaikan piutang. *Conditional revenue model* didasarkan pada *discretionary revenue* yang merupakan perbedaan antara perubahan aktual pada piutang dan perubahan prediksi pada piutang berdasarkan pada model. Piutang yang tidak normal, tinggi atau rendah, mengindikasikan adanya manajemen pendapatan (Stubben, 2010).

*Discretionary revenue* mengambil sejumlah bentuk. Beberapa melibatkan manipulasi aktivitas riil seperti diskon penjualan, kelonggaran persyaratan kredit, *channel stuffing*, dan *bill and hold sales* dan yang lainnya tidak, misalnya pengakuan pendapatan menggunakan agresif atau aplikasi yang salah dari GAAP, pendapatan fiktif, dan penangguhan pendapatan (Stubben, 2010). *Channel stuffing* merupakan cara manajemen untuk menghindari pelaporan kerugian dengan melakukan kelonggaran terhadap kebijakan kredit perusahaan (Tung .et.al., 2008). Tindakan ini memiliki banyak risiko seperti pengembalian barang dagang oleh para distributor atau konsumen karena barang tidak laku. Sedangkan *bill and hold sales* terjadi ketika hak kepemilikan sudah berpindah dan pembayaran telah diterima namun penjual masih memiliki produk atau produk masih di tangan penjual.

Menurut Stubben (2010), pengakuan pendapatan lebih awal (*premature revenue recognition*) adalah bentuk paling umum dari manajemen pendapatan. Dengan adanya pengakuan pendapatan secara prematur yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada pendapatan itu sendiri dan piutang. Dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode yang akan datang atau belum terealisasi mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Akibatnya, seolah-olah kinerja perusahaan lebih baik daripada kinerja sesungguhnya (Sulistyanto, 2008).

Seperti yang ditemukan Feroz et al. (1991) dalam Stubben (2010) lebih dari setengah kasus hukum SEC antara 1982 sampai 1989 terlibat hasil piutang yang berlebihan dari pengakuan pendapatan lebih awal. Stubben (2010), menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan akrual dan pendapatan bergantung pada faktor spesifik perusahaan seperti kebijakan kredit dan perusahaan. Oleh karena itu Stubben (2010) membuat estimasi yang memberikan koefisien pendapatan untuk kebijakan kredit perusahaan.

Berikut merupakan formula dari *conditional revenue model*:

$$AR_{it} = \alpha + \beta_1 \Delta R_{it} + \beta_2 \Delta R_{it} \times SIZE_{it} + \beta_3 \Delta R_{it} \times AGE_{it} + \beta_4 \Delta R_{it} \times AGE\_SQ_{it} + \beta_5 \Delta R_{it} \times GRR\_P_{it} + \beta_6 \Delta R_{it} \times GRR\_N_{it} + \beta_7 \Delta R_{it} \times GRM_{it} + \beta_8 \Delta R_{it} \times GRM\_SQ_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan : AR = piutang akrual; R = *annual revenue*; SIZE = natural log dari total aset saat akhir tahun; AGE = natural log umur perusahaan ; GRR\_P = *industry median adjusted revenue growth* (= 0 if negative); GRR\_N = *industry median adjusted revenue*

*growth* (= 0 if positif); *GRM* = *industry median adjusted gross margin at end of fiscal year*; *SQ* = *square of variable*;  $\Delta$  = *annual change*

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan proksi dari kekuatan finansial. Ukuran dan umur perusahaan merupakan proksi untuk tahap perusahaan dalam *business cycle*. Sebagai proksi dari kinerja operasional dari perbandingan perusahaan dengan perusahaan kompetitor, digunakan *industry-median-adjusted growth rate in revenue* dan *industry-median-adjusted gross margin* (Stubben, 2010).

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan di atas, pada penelitian ini model yang digunakannya adalah formula *conditional revenue model* yang dikembangkan oleh Stubben pada tahun 2010.

### **Komite Audit**

Dalam FCGI (2000) dinyatakan bahwa Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan suatu komponen yang baru dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan. Seperti dalam Kep. 29/PM/2004 yang menuliskan tugas dari komite audit adalah: (a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; (b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan; (c) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal; (d) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi; (e) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,

Berdasarkan peraturan BI No.8/4/PBI/2006 menyatakan tentang tugas komite audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan. Suryana (2004) menguji pengaruh interaksi antara komite audit terhadap praktik manajemen laba. Dengan menggunakan sampel perusahaan *non financial* yang listing di BEJ untuk tahun 2001 hingga 2002, menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan komite audit justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian Siregar (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan, artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membukukan adanya pengaruh yang signifikan antara karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Komite audit yang terdiri dari lebih banyak komisaris independen yang tidak menjabat sebagai manajer di perusahaan lain, komite audit yang memiliki minimal satu anggota yang merupakan ahli keuangan, adanya mandat formal yang merupakan tanggung jawab komite untuk memeriksa laporan keuangan dan auditor eksternal, dan keberadaan komite audit yang hanya terdiri dari komisaris independen yang bertemu lebih dari dua kali dalam satu tahun berhubungan negatif dengan tingkat *discretionary accruals*. Klein (2002) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara komite audit yang independen dengan akrual tidak normal sebagai proksi manajemen laba. Jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan manajemen laba.

Penelitian-penelitian di Indonesia yang mengulas tentang karakteristik komite audit jumlahnya masih sangat terbatas. Selain itu, hasil dari kedua penelitian di Indonesia sebelumnya tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan di luar Indonesia. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh komite audit terhadap manajemen laba yang akan lebih menekankan pada karakteristik komite auditnya.

BAPEPAM dan BEI telah mengeluarkan peraturan yang memperkuat independensi dan efektivitas komite audit. Salah satunya yaitu mewajibkan perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki komite audit. Peraturan tersebut berisi tentang karakter yang harus dimiliki oleh komite audit, tugas, wewenang dan hak komite audit dalam perusahaan. Diharapkan bahwa perusahaan yang telah mempunyai komite audit dapat terhindar dari masalah manajemen laba.

#### **Keahlian Anggota Komite Audit**

Penelitian Pamudji (2010) menemukan bahwa keahlian di bidang akuntansi dan keuangan seperti yang disyaratkan oleh regulator berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap dengan tingkat manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan komite audit yang berkompentensi di bidang akuntansi dan keuangan hanya dilakukan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, kurang jelasnya definisi *financial literacy* yang harus dimiliki oleh anggota komite audit menyebabkan tiap perusahaan sampel kemungkinan memiliki definisi yang berbeda dalam menentukan jumlah anggota komite audit yang memiliki *financial literacy* (Fitriasari, 2007).

#### **Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit**

Frekuensi pertemuan antar anggota komite audit diukur dengan jumlah pertemuan antar anggota komite audit yang dilakukan dalam satu tahun. Dalam penelitian Pamudji (2010) menemukan bahwa frekuensi pertemuan komite audit ternyata tidak efektif mengurangi tingkat manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh pembentukan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada. Selain itu, komite audit belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan perannya tidak efektif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembentukan komite audit pada perusahaan manufaktur belum mencapai kesuksesan dalam menjalankan peran pengawasannya.

#### **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Di luar negeri Dewan Pengawas Syariah disebut juga sebagai *Sharia Supervisory Board* (SSB), atau *Sharia Committee*, atau *Sharia Council*, dan sebagainya. Ketentuan mengenai jumlah

keanggotaannya berbeda-beda untuk setiap Negara, akan tetapi mengenai fungsi dan tugasnya sama. (Yudianto, 2011)

Dewan Pengawas Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat 10 menyatakan dewan pengawas syariah merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas maka Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan unit yang hanya dimiliki oleh perusahaan/organisasi yang dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk meyakinkan bahwa operasi, transaksi, bisnis lembaga keuangan itu dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam (Prasetyoningrum, 2010). Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah ini seharusnya terdiri dari ahli syariah, yang sedikitnya banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis (Prabowo, 2000).

Prasetyoningrum, (2010) memberikan definisi Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga Independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat (*fiqh almuamalat*). Namun Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota diluar fikih tetapi ahli juga didalam bidang lembaga keuangan Islam dalam fikih muamalat. Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berkewajiban mengarahkan, *mereview* dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa anggota Dewan Pengawas Syariah akan mengikat lembaga keuangan Islam.

### Penelitian Terdahulu

Riset yang dilakukan oleh Pamudji (2010) dengan judul Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba dengan variabel independen yang digunakan Independensi komite audit, Keahlian anggota komite audit, Jumlah pertemuan antar anggota komite audit, Komitmen waktu komite audit, terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa Independensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba sedangkan Keahlian anggota komite audit, Jumlah pertemuan anggota komite audit, Komitmen waktu anggota komite audit, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Riset yang dilakukan oleh Kusumawati dkk (2013) dengan judul Pengaruh Asimetri Informasi dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Praktik *Earnings Management*. Variabel yang digunakan adalah Asimetri informasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa 1) Asimetri informasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit, tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, 2) Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di perusahaan dengan hubungan positif, makin besar ukuran dewan komisaris di perusahaan makin tinggi praktik manajemen laba.

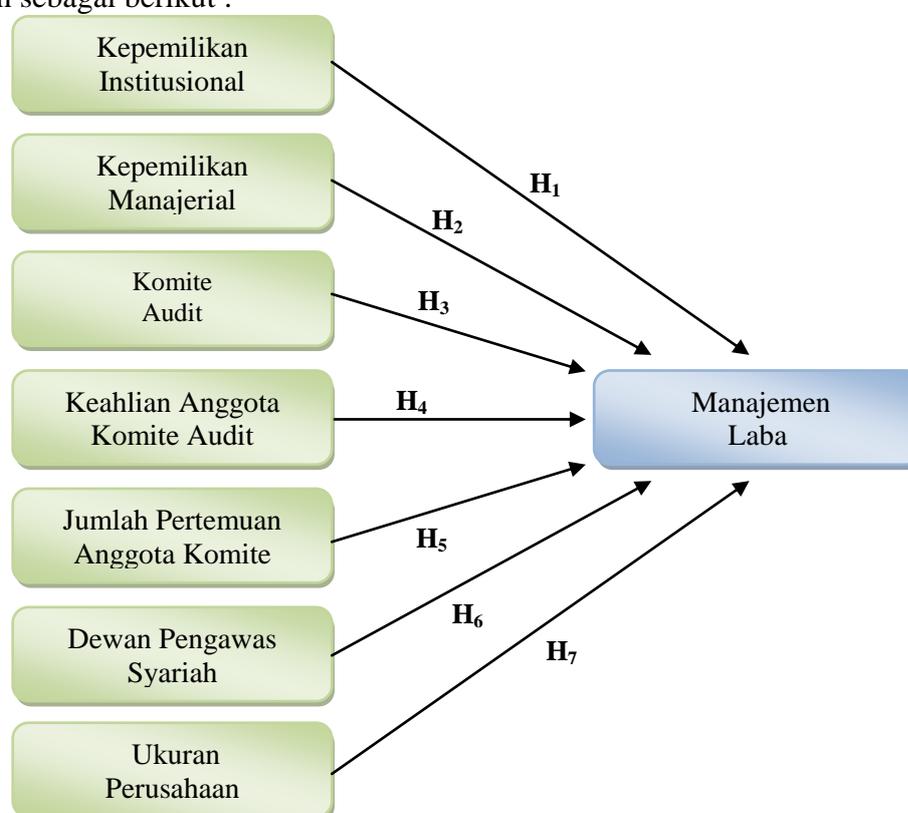
Penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) dengan judul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 1) Komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham oleh manajemen/ kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi laba, 2) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Sefiana (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang

Telah *Go Public* di BEI. Variabel yang digunakan adalah komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang diukur menggunakan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel pengukuran tersebut tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, hal ini dikarenakan penerapan corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sampel disebabkan karena untuk pemenuhan regulasi saja. Selain itu, penerapan corporate governance masih merupakan hal yang baru di Indonesia dan efek dari penerapan corporate governance tersebut baru dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang.

### Rerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 1.** Model Pemikiran

**Hipotesis.** Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Ha<sub>1</sub> : Kepemilikan Institusional (X<sub>1</sub>) berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y).
- Ha<sub>2</sub> : Kepemilikan Manajerial (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y).
- Ha<sub>3</sub> : Komite Audit (X<sub>3</sub>) berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y).
- Ha<sub>4</sub> : Keahlian Anggota Komite Audit (X<sub>4</sub>) berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y).
- Ha<sub>5</sub> : Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit (X<sub>5</sub>) berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y).
- Ha<sub>6</sub> : Dewan Pengawas Syariah (X<sub>6</sub>) berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y).

Ha<sub>7</sub> : Ukuran Perusahaan (X<sub>7</sub>) berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y)

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kausal komperatif* yang merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, (Indiantoro, 2009).

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui perantara dari pihak kedua maupun media tertentu yang mendukung penelitian ini. Data penelitan bersumber dari data Statistik Perbankan Indonesia dan Perbankan Syariah Indonesia, berupa data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2010-2013 yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Indonesia melalui situsnya ([www.bi.co.id](http://www.bi.co.id)) serta dari situs terkait pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, 2008). Populasi mengacu pada keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sanusi, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 31 Layanan Syariah (*Office Channeling*) Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti atau diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi, jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi (Djarwanto, 2008). Pedoman jumlah sampel tidak mengikat, karena dalam praktek pengumpulan sampel kadang mengalami hambatan dalam tenaga, dana, waktu dan ciri-ciri populasi yang tidak memungkinkan (Santoso, 2011). Penelitian ini mengambil sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS) sebagai sampel, yaitu: 1) PT Bank Central Asia Syariah, 2) PT Bank Negara Indonesia Syariah, 3) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, 4) PT Bank Jabar Banten Syariah, 5) PT. Bank Maybank Syariah Indonesia, 6) PT Bank Muamalat Indonesia, 7) PT Bank Panin Syariah, 8) PT Bank Syariah Bukopin, 9) PT. Bank Syariah Mandiri, 10), PT Bank Syariah Mega Indonesia, dan 11) PT Bank Syariah Victoria

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Metode studi pustaka dengan melakukan telaah pustaka dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti berbagai jurnal, artikel dan buku literatur lainnya yang mendukung proses penelitian ini. Sedangkan metode dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Metode Analisis. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian seperti: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan

Manajerial, Komite Audit, Keahlian Anggota Komite Audit, Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba. Sedangkan untuk memberikan deskripsi tentang karakter variabel penelitian digunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan angka modus, kisaran skor dan standar deviasi. Pengujian prasyarat analisis mencakup uji normalitas, homogenitas, dan signifikansi dan linearitas.

### Uji Hipotesis

Pada penelitian ini penulis menggunakan tujuh variabel independen dan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda, yaitu regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan pendekatan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi peneliti mengenai Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \epsilon$$

Dimana:  $X_1$  = Kepemilikan Institusional;  $X_2$  = Kepemilikan Manajerial;  $X_3$  = Komite Audit;  $X_4$  = Keahlian Anggota Komite Audit;  $X_5$  = Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit;  $X_6$  = Dewan Pengawas Syariah;  $X_7$  = Ukuran Perusahaan;  $B$  = Konstanta;  $Y$  = Manajemen Laba

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 atau 5%. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian dengan cara menguji secara simultan melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F), yang bermaksud untuk dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji masing-masing variabel secara parsial, dilakukan dengan uji signifikansi parameter individual (uji t statistik) yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen, serta variabel mana yang dominan mempengaruhi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian *Conditional Revenue Model*

Pola perusahaan dalam melakukan manajemen laba dalam pengukuran Stubben adalah dengan cara memajukan pengakuan pendapatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan *FOB Shipping Point*. *FOB Shipping Point* adalah metode pengakuan transaksi penjualan dengan cara mengakui pendapatan terlebih dahulu tanpa memperhitungkan bahwa barang tersebut telah sampai pada konsumen ataupun belum. Dalam hal ini, perusahaan dapat memajukan pendapatan untuk tahun berikutnya ke tahun berjalan untuk memperbesar laba yang dihasilkan. Untuk mengukur adanya indikasi praktik manajemen laba riil dengan menggunakan nilai residual. Nilai residual tersebut adalah nilai *error* dengan interval yang kurang dari -0.075 dan melebihi 0.075 ( $\epsilon < -0.075$  atau  $\epsilon > 0.075$ ) mengindikasikan terjadinya praktik manajemen laba.

Berdasarkan pengujian terhadap formula *Conditional Revenue Model* pada Tabel 2 di atas, terdapat 14 (39%) sampel yang memiliki nilai lebih dari 0.075 dan yang kurang

dari  $-0.075$  sebesar 16 (44%) sampel terindikasi melakukan praktek manajemen laba. Apabila nilai yang kurang dari  $-0.075$  dan melebihi  $0.075$  digabungkan, maka persentase yang terindikasi melakukan praktek manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah adalah 27 (75%) dari 36 sampel yang diteliti

**Tabel 2.** Frekuensi Perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba

Nilai Residual	Perusahaan Terindikasi Melakukan MLA	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
$< -0.075$	13	36	36	36
$> -0.075 < 0.075$	9	25	25	61
$> 0.075$	14	39	39	100
Total	36	100	100	

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian yang disajikan dalam Tabel 3. Dari tabel tersebut dapat diketahui informasi tentang rata-rata, deviasi standar, nilai maksimum dan nilai minimum.

**Tabel 3.** Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan institusional	4 persen	5 persen	4,58 persen	0,062 persen
Kepemilikan manajerial	0 persen	17 persen	2,71 persen	5,408 persen
Komite Audit	2orang	5orang	3,37orang	0,688orang
Keahlian Anggota KA	1orang	5orang	2,89orang	0,847orang
Jumlah Pertemuan Anggota KA	3 kali	43 kali	12,11 kali	9,423 kali
Dewan Pengawas Syariah	2orang	4orang	2,52orang	0,643orang
Ukuran perusahaan	14 triliun	18 triliun	15,81 triliun	1,360 triliun
Manajemen laba	-13 persen	12 persen	-0,01 persen	4,440 persen

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut: (1) Kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional mempunyai nilai minimum sebesar 4 persen dan nilai maksimum 5 persen. Rata-rata kepemilikan institusional adalah 4,58 persen dengan standar deviasi 0,062 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Kepemilikan Institusional terdistribusi normal, karena nilai standar deviasi Kepemilikan Institusional lebih kecil dari nilai rata-rata Kepemilikan Institusional.; (2) Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mempunyai nilai minimum 0 persen dan nilai maksimum 17 persen. Rata-rata kepemilikan manajerial adalah 2,71 persen dengan standar deviasi sebesar 5,408 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Kepemilikan Manajerial sampel sangat berfluktuasi karena selisih antara Kepemilikan Manajerial maksimum dengan Kepemilikan Manajerial minimum cukup besar, nilai standar deviasi Kepemilikan Manajerial lebih besar dari nilai rata-rata Kepemilikan Manajerial. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial tidak terdistribusi normal.; (3) Komite Audit. Komite Audit mempunyai nilai minimum 2 orang dan nilai maksimum 5 orang. Rata-rata Komite Audit adalah 3,37 orang dengan standar deviasi sebesar 0,688 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi komite audit sampel sangat berfluktuasi karena selisih antara komite audit maksimum dengan komite audit minimum cukup besar, nilai standar deviasi komite audit lebih kecil dari nilai

rata-rata komite audit. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel komite audit terdistribusi normal.; (4) Keahlian Anggota Komite Audit. Keahlian Anggota Komite Audit mempunyai nilai minimum 1 orang dan nilai maksimum 5 orang. Rata-rata Keahlian Anggota Komite Audit adalah 2,89 orang dengan standar deviasi sebesar 0,847 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Keahlian Anggota Komite Audit sampel sangat berfluktuasi karena selisih antara Keahlian Anggota Komite Audit maksimum dengan Keahlian Anggota Komite Audit minimum cukup besar, nilai standar deviasi Keahlian Anggota Komite Audit lebih kecil dari nilai rata-rata Keahlian Anggota Komite Audit. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Keahlian Anggota Komite Audit terdistribusi normal.; (5) Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit. Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit mempunyai nilai minimum 3 kali dan nilai maksimum 43 kali. Rata-rata Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit adalah 12,11 kali dengan standar deviasi sebesar 9,423 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit sangat berfluktuasi karena selisih antara Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit maksimum dengan Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit minimum cukup besar, nilai standar deviasi Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit lebih kecil dari nilai rata-rata Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit terdistribusi normal.; (6) Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah mempunyai nilai minimum 2 orang dan nilai maksimum 4 orang. Rata-rata Dewan Pengawas Syariah adalah 2,52 orang dengan standar deviasi sebesar 0,643 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Dewan Pengawas Syariah sampel sangat berfluktuasi karena selisih antara Dewan Pengawas Syariah maksimum dengan Dewan Pengawas Syariah minimum cukup besar, nilai standar deviasi Dewan Pengawas Syariah lebih kecil dari nilai rata-rata Dewan Pengawas Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah terdistribusi normal. (7) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mempunyai nilai minimum 14 Triliun dan nilai maksimum 18 Triliun. Rata-rata Ukuran perusahaan adalah 15,81 Triliun dengan standar deviasi sebesar 1,360 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Ukuran Perusahaan sampel sangat berfluktuasi karena selisih antara Ukuran Perusahaan maksimum dengan Ukuran Perusahaan minimum cukup besar, nilai standar deviasi Ukuran Perusahaan lebih kecil dari nilai rata-rata Ukuran Perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Ukuran Perusahaan terdistribusi normal.; (8) Manajemen laba. Manajemen laba mempunyai nilai minimum -13 persen dan nilai maksimum 12 persen, dengan rata-rata Manajemen laba -0.01 persen dan standar deviasi 4,440 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Manajemen laba sampel sangat berfluktuasi karena selisih antara Manajemen laba maksimum dengan Manajemen laba minimum cukup besar, nilai standar deviasi Manajemen laba lebih besar dari nilai rata-rata Manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Manajemen laba tidak terdistribusi normal.

#### **Pembahasan. Pengaruh Kepemilikan institusional ( $X_1$ ) terhadap manajemen laba (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh dan signifikan terhadap Manajemen Laba dengan arah negatif. Artinya semakin besar prosentase kepemilikan saham oleh institusi akan menurunkan praktik manajemen laba. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Jiang dan Anandarajan (2009) yang menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan

kepemilikannya yang besar, agar motivasi manajer untuk menata laba menjadi berkurang. Temuan ini tidak mendukung temuan Kusumawati dkk (2013), dan Khafid (2012), yang menemukan bahwa Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba.

#### **Pengaruh Kepemilikan manajerial (X<sub>2</sub>) terhadap manajemen laba (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh dan signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif. Artinya Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh manajemen semakin rendah tingkat manajemen laba yang mungkin dilakukan. Hasil penelitian ini membuktikan dengan adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan akan mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer dalam bertindak agar lebih berhati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya. Temuan ini mendukung hasil penelitian Khafid (2012), tetapi tidak mendukung hasil penelitian Kusumawati dkk (2013), yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

#### **Komite audit (X<sub>3</sub>) terhadap manajemen laba (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap Manajemen laba dengan arah negatif. Artinya semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan akan menurunkan praktik manajemen laba. Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Komite audit yang terdiri dari lebih banyak komisaris independen yang tidak menjabat sebagai manajer di perusahaan lain, komite audit yang memiliki minimal satu anggota yang merupakan ahli keuangan, adanya mandat formal yang merupakan tanggung jawab komite untuk memeriksa laporan keuangan dan auditor eksternal, dan keberadaan komite audit yang hanya terdiri dari komisaris independen yang bertemu lebih dari dua kali dalam satu tahun berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Khafid (2012), Pamudji dan Trihartati (2010), tetapi tidak mendukung hasil penelitian Sefiana (2012) dan Kusumawati dkk (2013), yang menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

#### **Pengaruh keahlian anggota komite audit (X<sub>4</sub>) terhadap manajemen laba (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial keahlian anggota komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Manajemen laba. SEC (1999) menghendaki bahwa setiap komite audit harus terdiri dari minimal satu orang anggota yang merupakan ahli keuangan. Hal tersebut juga disyaratkan oleh BAPEPAM (2004). Keahlian di bidang keuangan sama pentingnya bagi komite audit karena fungsi utama dari komite tersebut adalah mengawasi proses pelaporan keuangan sebuah perusahaan (Rahman & Ali, 2006). DeZoort & Salterio (2001) berpendapat bahwa ahli keuangan dalam sebuah komite audit meningkatkan kemungkinan bahwa kesalahan pernyataan yang material (*material misstatement*) akan dikomunikasikan kepada komite audit dan dikoreksi secara tepat waktu. Xie et al. (2003) dan Choi et al. (2004) menyatakan bahwa anggota komite audit yang merupakan komisaris independen yang ahli di bidang keuangan merupakan pihak

yang efektif untuk mengurangi manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan pernyataan tersebut. Berdasarkan kenyataan yang ada, hal itu disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pembentukan komite audit yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan keuangan hanya didasarkan pada peraturan yang berlaku (Khomsiyah, 2005).

Selain itu, peraturan BAPEPAM belum menjelaskan karakteristik apa sajakah yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dinyatakan memiliki *financial literacy*. Sehingga, kurang jelasnya definisi *financial literacy* yang harus dimiliki oleh anggota komite audit menyebabkan tiap perusahaan sampel kemungkinan memiliki definisi yang berbeda. Hal ini berpengaruh pada penunjukkan anggota komite audit yang memiliki *financial literacy* (Fitriasari, 2007). Hasil penelitian ini mendukung temuan Pamudji & Trihartati (2010), yang menunjukkan bahwa keahlian anggota komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

#### **Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit ( $X_5$ ) terhadap manajemen laba (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial jumlah pertemuan anggota komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap Manajemen laba dengan arah negatif. Artinya semakin tinggi frekuensi pertemuan rutin antar anggota komite audit akan menurunkan praktik manajemen laba. Frekuensi pertemuan antar anggota komite audit diukur dengan jumlah pertemuan antar anggota komite audit yang dilakukan dalam satu tahun. Penelitian ini menemukan bahwa frekuensi pertemuan komite audit ternyata efektif mengurangi tingkat manajemen laba. Hal ini karena komite audit sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan perannya efektif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembentukan komite audit pada perusahaan perbankan syariah sudah mencapai kesuksesan dalam menjalankan peran pengawasannya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Pamudji & Trihartati (2010), yang menunjukkan bahwa jumlah pertemuan anggota komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

#### **Dewan Pengawas Syariah ( $X_6$ ) berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Manajemen laba. Hal ini karena tidak semua Dewan Pengawas Syariah mempunyai keilmuan sesuai dengan kriteria yang harus dimiliki. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter misalnya, dampak bunga terhadap investasi, produksi, *unemployment*. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syariah. Pada penelitian ini dimungkinkan bahwa laporan keuangan bank telah sesuai dengan syariat islam, namun Auditor DPS tidak memiliki akses yang cukup ke semua dokumen dan catatan yang mereka butuhkan dalam melaksanakan tugas mereka.

### **Pengaruh ukuran perusahaan (X<sub>7</sub>) terhadap manajemen laba (Y)**

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan belum tentu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba, karena perusahaan besar lebih banyak memiliki aset dan memungkinkan banyak aset yang tidak dikelola dengan baik sehingga kemungkinan kesalahan dalam mengungkapkan total aset dalam perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Chtourou *et al.* (2001), Lee dan Choi (2002), Midiastuty dan Machfoedz (2003), Saleh *et al.* (2005), Liu dan Lu (2007), dan Cornett *et al.* (2009) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap besaran pengelolaan laba.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh dan signifikan terhadap Manajemen Laba dengan arah negatif. Artinya semakin besar prosentase kepemilikan saham oleh institusi akan menurunkan praktik manajemen laba. Temuan ini tidak mendukung temuan Kusumawati dkk (2013), dan Khafid (2012) yang menjelaskan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. (2) Secara parsial Kepemilikan Manajerial berpengaruh dan signifikan terhadap Manajemen laba dengan arah negatif. Artinya Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh manajemen semakin rendah tingkat manajemen laba yang mungkin dilakukan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Khafid (2012), tetapi tidak mendukung hasil penelitian Kusumawati dkk (2013) yang menjelaskan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. (3) Secara parsial komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap Manajemen laba dengan arah negatif. Artinya semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan akan menurunkan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Khafid (2012), Pamudji dan Trihartati (2010), tetapi tidak mendukung hasil penelitian Sefiana (2012) dan Kusumawati dkk (2013), yang menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. (4) Secara parsial keahlian anggota komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung temuan Pamudji & Trihartati (2010), yang menunjukkan bahwa keahlian anggota komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. (5) Secara parsial jumlah pertemuan anggota komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap Manajemen laba dengan arah negatif. Artinya semakin tinggi frekuensi pertemuan rutin antar anggota komite audit akan menurunkan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Pamudji & Trihartati (2010), yang menunjukkan bahwa jumlah pertemuan anggota komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. (6) Secara parsial Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Manajemen laba. Hal ini dimungkinkan bahwa semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap manipulasi laba yang dilakukan manajer. (7) Secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Chtourou *et al.* (2001), Lee dan Choi (2002), Midiastuty dan Machfoedz (2003), Saleh *et al.* (2005), Liu dan Lu (2007), dan Cornett *et al.* (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap besaran pengelolaan laba.

## Saran

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini mengandung keterbatasan-keterbatasan. Namun hasil penelitian ini setidaknya dapat memotivasi dilakukannya penelitian berikutnya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian yang akan datang memperbaiki faktor-faktor berikut ini: (1) Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel independen selain dari variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Keahlian Anggota Komite Audit, Jumlah Pertemuan Anggota Komite, Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan seperti Proporsi Dewan Komisaris, Akuntan Publik, dan Ketepatan Waktu Dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan sehingga dengan menambah variabel akan menambah temuan baru yang lebih baik lagi yang diduga dapat mempengaruhi manajemen laba; (2) Peneliti selanjutnya disarankan mengganti objek penelitian selain perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia seperti Perusahaan Perusahaan manufaktur yang listed di BEI; (3) Sebaiknya penggolongan ukuran perusahaan tidak hanya diukur dengan besarnya total asset sehingga penelitian selanjutnya perlu dikembangkan dengan variable ukuran lain seperti nilai pasar ekuitas dan total penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Komarudin, Imam Subekti dan Sari Atmini. (2007) "Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba Pada Perusahaan Publik Di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Agustia, Dian. (2013) "Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba". Universitas Airlangga Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 1, hal 23-36
- Boulila, Taktak, Neila, Sarra Ben Slama Zouari, Abdelkader Boudriga. (2010) "Do Islamic Banks Use Loan Loss Provisions to Smooth Their Result?", *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 1 No. 2, hal 155-167
- Charles, Chariri. (2012) "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility". *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Cornett, M. M., McNutt, J. J., and Tehranian, H. (2009) "Corporate Governance and Earnings Management at Large U.S. Bank Holdings Companies". *Journal of Corporate Finance*. Vol. 15, No 3, hal 412-430.
- Djarwanto, P. S. (2008) *Statistik Sosial Ekonomi Bagian 1* Edisi 3. BPFE Yogyakarta
- Fanani, Zaenal. (2006) "Manajemen Laba: Bukti Dari Set Kesempatan Investasi, Utang, Kos Politik, dan Konsentrasi Pasar Pada Pasar Yang Sedang Berkembang". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang Tanggal 23-26 Agustus.
- Faradila, Astri dan Cahyati, Ari Dewi. (2013) "Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah". UNISMA Bekasi. *JRAK*, Vol. 4 No.1, hal 58-72
- Fitriasari, Debby. (2007) "Pengaruh Aktivitas dan Financial Literacy Komite Audit terhadap Jenis Manajemen Laba". *Simposium Nasional Akuntansi*, Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Freeman, Robert J., and Shoulder, Craig D.. (2008) *Governmental and Nonprofit Accounting Theory and Practice*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson International Edition
- Ghozali, Imam. (2005) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. (2011) *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, Imam. and Fuad. (2008) *Struktural Equation Modelling*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Yusvika Pitri. (2014) “Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum Dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (Konvergensi IFRS) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2, No 1, hal 78-92
- Hasan, Widy Hastuty. (2013) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia)”. *Tesis Sekolah Pascasarjana*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Indriantoro Nur & Supomo Bambang. (2009) *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Penerbit BPFE Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan kedua, Yogyakarta.
- Jiang, W., and Anandarajan, A. (2009). “Shareholder Rights, Corporate Governance and Earnings Quality: The Influence of Institutional Investors”. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 24. No. 8, hal 767 – 791.
- Jogiyanto, H. M. (2010) *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta : BPFE.
- Kartika, Tri Perwirasari. (2010) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Universitas Gunadarma.
- Khafid, Muhammad. (2012) “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, hal 245-260
- Kiswara, Endang. (2011) “Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda”. *Thesis*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Kusumawati, Zaidah. (2005) *Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi Syaria'ah*. Yogyakarta : Magistra Insania Press.
- Kusumawati, Eny. Sari, Shinta Permata dan Trisnawati, Rina. (2013) “Pengaruh Asimetri Informasi Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Praktik Earnings Management”. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall*, 23 Maret
- Mainardes, E.W., Alves, H. and Mario Raposo. (2011) “Stakeholder theory: issue to resolve”. *Management Decision*, Vol 49 No. 2, hal 226-252.
- Nasution, M dan Setiawan, D. (2007) Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar
- Padmantlyo, Sri. (2010) “Analisis Manajemen Laba Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah”. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 14, Nomor 2, hal, 256-272
- Pamudji, Sugeng dan Aprillya Trihartati. (2010) “Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba”. Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 2, No. 1, hal 1-21

- Prasetyoningrum, Ari Kristin. (2010) "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah". *Jurnal Aset*, Vol 12, No 1, hal. 27-36
- Santoso, Singgih. (2011) *Structural Equation Modelling: Konsep dan Aplikasi dengan AMOS*. Jakarta: Elex Media Computindo
- Sanusi, Anwar.(2011) *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat Jakarta
- Scott, William R. (2011) *Financial Accounting Theory. Sixth Edition*. Canada: Person Prentice Hall
- Sefiana, Eka. (2012) *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Telah Go Public di BEI*. Universitas Gunadarma
- Sudjana. (2010) *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito
- Sugiyono. (2011) *Statistika untuk Penelitian*, Penerbit Alfabet, Cetakan Kesembilan, Bandung.
- Sulistiyanto, Sri. (2011) *Manajemen Laba "Teori dan Empiris"*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Stubben, S. (2010) "Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management". *The Accounting Review*, Vol 85, No. 2, hal. 695-717.
- Syahfandi, Rizky dan Mutmainah, Siti,. (2012) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*. Universitas Diponegoro Semarang
- Wahyudi, Untung dan Pawestri, Hartini Prastyaning. (2006) "Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening", *SNA IX*, IAI, Padang, K-AKPM 17
- Yudianto, Agus. (2011) "Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah di Jawa Barat". *Tesis Program Pascasarjana*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Zahara dan Siregar, Veronica Sylvia. (2009) "Pengaruh Rasio Camel Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Syariah". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, No.2 VOL.12, 01, hal 25-45